

## **BAB IV**

### **UPAYA PEMERINTAH CHINA DALAM MENINGKATKAN INVESTASI ASING MELALUI DIASPORA ETNIS CHINA**

Dibukanya perdagangan internasional oleh China menjadi komponen penting dari reformasi ekonomi yang telah dilakukan. Bagi pemerintah China sendiri terdapat beberapa alasan kepentingan pemerintah China dalam mendatangkan FDI. Pertama, untuk membantu kekurangan modal dalam membangun ekonomi. Deposito bank yang rendah membatasi tingkat investasi skala domestik dan sebagai akibatnya pertumbuhan perusahaan lokal sangat terbatas karena kurangnya aliran modal masuk. Oleh karena itu, menarik investasi asing menjadi sebuah langkah yang penting untuk mendukung perkembangan ekonomi China.

Kedua, adanya buah dari hasil masuknya investasi asing berupa teknologi yang maju memberikan dorongan untuk melakukan inovasi teknologi. Transfer ilmu pengetahuan serta teknologi dari perusahaan asing memberikan keterampilan bagi masyarakat China yang kemudian dapat mengembangkan pengetahuan berbasis inovasi untuk dapat bersaing (Muhammad Waqas Balooch, 2015). Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai langkah dan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah China dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui diaspora China yang tersebar di berbagai negara. selanjutnya bagaimana pandangan pemerintah China terhadap FDI dan langkah apa yang dilakukan dalam upaya meningkatkan FDI atau investasi asing tersebut melalui diaspora China, dan apakah cara tersebut sudah pernah diterapkan di negara lain dan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi

## A. Foreign Direct Investment/investasi asing di China

### 1. Faktor pendukung masuknya FDI di China

Pertama yaitu kondisi ekonomi China. Tujuan utama dari masuknya FDI kesuatu negara adalah untuk melakukan kegiatan menjual bisnis berupa jasa dan barang kepada negara tuan rumah, perkembangan ekonomi negara tuan rumah serta prospek pertumbuhan jangka panjang yang akan dihasilkan negara tuan rumah sangat menjadi faktor pendukung untuk menarik perhatian FDI. Para investor asing diberikan kesempatan untuk melakukan investasi yang lebih besar dan disediakan sarana pasar oleh negara tuan rumah untuk membangun kepercayaan diri mereka karena mengingat pelaku ekonomi lokal juga memiliki peluang yang besar. Populasi penduduk China yang sangat besar menimbulkan rasa percaya para investor asing internasional bahwa China merupakan pasar ekonomi terbesar didunia dan dapat menjadi peluang bagi para investor, ditambah lagi aktivitas berbelanja penduduk China yang meningkat (Zhang S. s., 2000).

Kedua, Sumber daya alam. China memiliki cadangan energi yang besar dan juga merupakan salah satu produsen terbesar bahan bakar minyak dan batubara di dunia. karena produksi energi yang besar, mengharuskan China melakukan perdagangan keluar. Industri batubara di China juga sangat besar bahkan terbesar didunia. Dari sektor zat besi juga melimpah bahkan menyebabkan harga jual yang sangat murah. Dengan adanya kekayaan sumber daya alam ini tentunya menjadi salah satu hal yang menarik perhatian investor asing untuk melakukan kerjasama terhadap China.

Ketiga, tenaga kerja. Sebuah penelitian jelas mengidentifikasi biaya tenaga kerja yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi disuatu negara menjadi faktor penting untuk menarik masuknya FDI kenegara tersebut (Welkelin K, 2002). Kepadatan jumlah penduduk di China jelas menciptakan persaingan kerja yang cukup tinggi

sehingga biaya tenaga kerja cenderung rendah, tetapi yang menjadi keunggulan adalah banyak dari tenaga kerja China ini merupakan tenaga kerja berpendidikan, terampil dan ahli dalam teknologi. Tenaga kerja yang demikian ini tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri ketika sebuah perusahaan atau kerjasama lainnya masuk untuk melakukan bisnis di China.

Keempat, infrastruktur, teknologi dan keuangan. Adanya infrastruktur dan fasilitas-fasilitas serta kemajuan telekomunikasi yang tersedia disuatu negara tuan rumah akan menarik minat FDI untuk masuk. Bukan sebuah hal yang baru ketika kenyamanan dan penunjang dalam lingkungan pekerjaan harus dipenuhi secara maksimal untuk meningkatkan kualitas yang akan dihasilkan. Selama beberapa tahun China berfokus pada pengembangan infrastruktur teknologi dan infrastruktur fisik. Gambar dibawah ini menunjukan kualitas perkembangan infrastruktur di China pada tahun 2011.

<b>Kualitas</b>	<b>Persentase</b>
Kualitas keseluruhan	56%
Kualitas jalan	62%
Kualitas Ports	59%
Kualitas transport udara	44%
Kualitas kereta api	79%
Kualitas pelayanan listrik	49%
Kualitas layanan telepon	65%
Jumlah keseluruhan	65%

*Sumber: World Economic Forum, BOFA Merrill Lynch Global Research 28 may 2011*

Kelima, keterbukaan terhadap perdagangan luar negeri. Berbicara tentang ekonomi China memang sangat mengesankan, menjadi negara yang sukses dalam perkembangan menjadikannya negara yang paling maju diantara negara-negara Asia lainnya dalam hal ekspor. Kebijakan yang diambil pada masa reformasi ekonomi menjadi awal mula terciptanya kerjasama perdagangan internasional China dengan negara-negara lainnya. Dalam hal akses untuk kepasar internasional, China memiliki beberapa kelebihan dan menjadi sangat bermanfaat. Beroperasinya kegiatan ekspor oleh FDI bertujuan untuk memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya tertentu untuk menekan biaya kemudian dapat dikirimkan kenegara asal atau negara pihak ketiga.

Yang terakhir yaitu mengenai kerangka regulasi. China memang serius dalam mengembangkan pengaruh dan pertumbuhan ekonominya, seperti menciptakan model hukum yang mengatur ranah bisnis agar dapat lebih menguntungkan. China juga telah memperkenalkan berbagai perubahan dalam peraturan mengenai FDI. Adanya liberalisasi kebijakan seperti menghilangkan pembatasan dalam beberapa sektor FDI yang sebelumnya dilarang. Kemudian adanya pemulihan dalam pengurangan sektor milik negara atau lebih dikenal dengan reformasi BUMN yang kemudian mengundang investor asing (Asim Faheem, 2011).

## **2. Faktor penghambat masuknya FDI di China**

Hadirnya FDI kesuatu negara memang memberikan keuntungan yang besar tetapi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dinegara tersebut bisa saja menjadi penghambat yang menurunkan minat investor asing untuk masuk kenegara tersebut. Perbedaan budaya dalam praktik bisnis di china juga menjadi hal yang sulit sehingga harus dipahami lebih dalam orang asing untuk dapat masuk dalam pasar bisnis di china. Selain itu di China sendiri masih terdapat hambatan-hambatan dibidang penegakan administratif dan birokrasi, kurangnya

transparansi serta lemahnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual, dimana China menuntut dan menerapkan kebijakan harus ada pemindahan teknologi. Adanya pengkategorian sektor industri yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di China menyebabkan pemerintah hanya mendorong industri di bidang teknologi tinggi, produksi peralatan atau bahan produk baru, bidang pelayanan, serta pendauran ulang. Jika perusahaan-perusahaan asing ini masuk kedalam kategori tersebut maka China akan membuka peluang yang besar (Bose, 2012).

## **B. Kebijakan FDI di China dan bentuk-bentuk penanaman modal asing**

### **1. Kebijakan China terhadap FDI**

Setelah membuka pintu untuk melakukan kerjasama internasional, China secara serius mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur kerjasama tersebut. Khususnya investasi asing yang merupakan salah satu upaya China dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi, teknologi dll, juga memiliki kebijakan tertentu. Setiap bentuk kerjasama investasi asing di China memiliki regulasi dan syarat tertentu. Yang menjadi kebijakan utama China terhadap investasi asing yang masuk ke negaranya adalah sebagai berikut: (1) memberikan pertumbuhan pada tingkat ekspor dan turut serta membantu menjaga keseimbangan perekonomian China. (2) ikut serta dalam kegiatan pembangunan daerah. (3) harus ada transfer teknologi. Dari kriteria tersebut mempromosikan ekspor dan melakukan transfer teknologi adalah tujuan utama China terhadap FDI yang akan masuk ke negaranya.

### **2. Bentuk penanaman modal asing**

Pemerintah China memiliki berbagai bentuk penanaman modal asing yang kemudian dapat dijadikan rujukan bagi para investor untuk melakukan kerjasama di China. Terdapat sekitar delapan jenis bentuk penanaman modal asing Di China.

Yang pertama Chinese-Foreign Equality Joint Ventures, merupakan bentuk kerjasama dari modal kedua perusahaan China dan pihak asing, organisasi ekonomi lainnya ataupun individu yang sesuai dengan undang-undang China. Pihak-pihak dari ekuitas Joint venture China dan pihak asing melakukan investasi dan operasi kerja secara bersama, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi saham masing-masing. Tipe kerjasama ini adalah model perseroan terbatas, memiliki status hukum orang China. Secara umum modal dari investor asing tidak kurang dari 25% dari total keseluruhan. Pihak mitra terkait dapat membuat kontribusi modal dalam bentuk uang ataupun non-uang seperti properti yang kemudian dapat ditukar kedalam bentuk bangunan, workshop, teknologi mesin, dan hak properti industri. Keuntungan dan kepentingan lainnya dari pihak luar investor dapat dikirimkan kenegara tujuan ataupun diinvestasikan kembali ke China.

Kedua, Chinese-Foreign Cooperative Joint Ventures Kerjasama Koperasi China-asing, disebut juga sebagai bentuk usaha patungan karena terbentuk didalam wilayah China oleh perusahaan asing. Berjalan tetap sesuai hukum dan aturan dari pemerintahan China dan didasarkan pada kondisi bersama. Para pihak dalam bentuk kerjasama ini harus benar-benar jelas menyusun kontrak masing-masing seperti hak, pembagian laba, tanggung jawab, serta resiko yang kemungkinan dapat terjadi. Ketika membangun kontrak kerjasama China dan asing, pihak asing biasanya menyediakan semua atau sebagian dari modal, keperluan teknologi dan peralatan-peralatan terkait, sedangkan pihak China menyediakan sarana kebutuhan lahan yang tepat, fasilitas dan bisa juga dalam bentuk modal.

Ketiga, Usaha sepenuhnya milik asing. Model investasi asing seperti ini seluruhnya diinvestasikan oleh perusahaan asing dan mendirikan perusahaanya di wilayah China tetapi tetap berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk mendapatkan status perusahaan yang sepenuhnya milik asing ini, maka

pihak perusahaan harus mengurus seluruh keperluan hukum sesuai undang-undang.

Keempat, Saham gabungan perusahaan terbatas dan modal asing. Model investasi ini terjadi dimana ketika perusahaan mendirikan usahanya diwilayah China dan bisa memperoleh saham dari perusahaan asal China yang terdaftar dalam usaha jangka pendek maupun jangka panjang dan tetap mengacu pada hukum dan undang-undang yang berlaku. Setiap pemegang saham akan mengambil tanggung jawab sesuai jumlah saham yang dimiliki.

Kelima, penanaman modal asing oleh perusahaan. Investor asing yang boleh mendirikan sebuah perusahaan dinegara tujuan yaitu China dapat mengambil bentuk perusahaan perseroan terbatas. Investor asing ini dapat memiliki perusahaan bersama ataupun sendiri secara keseluruhan dan harus memiliki keuangan yang baik. Untuk mendirikan sebuah perusahaan investasi maka harus mendaftarkan total aset yng setidaknya berjumlah USD \$ 400 juta ditahun sebelumnya, investor juga harus menyeter kontribusi modal untuk didaftarkan dengan jumlah melebihi US \$ 10 juta atau bisa juga melalui cara lain yaitu harus memiliki lebih dari sepuluh perusahaan investasi asing diwilayah China. Jika perusahaan telah berhasil memenuhi syarat ini maka perusahaan asing tersebut akan menikmati lingkup bisnis yang lebih luas dibandingkan mmodel perusahaan atau investasi asing lainnya.

Keenam, Investasi asing dalam bentuk usaha yang diinvestasikan. Istilah usaha yang diinvestasikan ini mengacu pada metode investasi yang masuk dalam kategori perusahaan teknologi tinggi yang tidak terdaftar. Bentuk usaha seperti ini didirikan di wilayah China oleh para investor asing atau oleh kedua investor asing. Perusahaan nantinya dapat mengambil bentuk keorganisasiannya dari perusahaan berbadan hukum ataupun tidak. Jika mengambil kerjasama dengan usaha yang tidak berbadan hukum maka harus melaksanakan kewajiban

bersama. Pembentukan kerjasama seperti ini harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) jumlah investor harus lebih dari 2 dan kurang dari 50. (2) jumlah minimum kontribusi modal dari investor yang non-hukum perusahaan berlangganan senilai US\$ 10 juta dan minimum kontribusi modal dari perusahaan langganan perusahaan menjadi US\$ 5 juta. Kecuali untuk investor yang memang dibutuhkan maka investor asing hanya perlu menyetor modal senilai US\$ 1 juta dan boleh menggunakan mata uang yang bebas tidak harus dalam bentuk mata uang China.

Ketujuh, Eksploitasi perusahaan China asing. Eksploitasi perusahaan China asing adalah dimana sebuah perusahaan China dan perusahaan asing menandatangani kontrak untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam seperti minyak bumi, mineral dan lain-lain secara bersama. Model kerjasama bisnis asing seperti ini biasanya dilakukan dalam tiga tahapan yaitu; eksplorasi, pengembangan dan produksi

Kedelapan, Build Operate Transfer (BOT) Model investasi asing BOT ini merupakan kegiatan dimana investor mengambil alih proyek industri atau infrastruktur tertentu dinegara tuan rumah seperti mengambil tanggung jawab untuk konstruksi, operasi pemeliharaan dan kegiatan transfer didalamnya. Investor dalam kurun waktu yang disepakati akan menjalankan fasilitas dan akan mengembalikan investasi dan biaya dalam kegiatan, pemeliharaan dan aspek-aspek lainnya didalam proyek tersebut. Jika nanti dilakukan pemutusan kontrak, maka kepemilikan proyek akan ditansfer kepemerintah daerah. Di China sendiri sistem kerjasama investasi asing BOT ini biasanya terjadi pada proyek-proyek pembangunan jalan raya, pusat-pusat infrastruktur lainnya dan juga pengolahan limbah (MINISTRY OF COMMERCE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

### **C. Upaya China meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui warga asing khususnya diaspora China**

China adalah negara dengan jumlah diaspora terbesar didunia. Melihat bagaimana perkembangan dan prospek ekonomi China dalam beberapa kurun waktu pasca reformasi ekonomi menyebabkan pemerintah China mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mendorong orang-orang China diluar negeri agar kembali kenegaranya dan ikut serta dalam membangun pertumbuhan negara khususnya pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh adalah kebijakan “the thousand talents programe” yang memiliki beberapa kriteria mulai dari orang-orang berbakat asal negara asing hingga orang-orang dan juga yang memiliki hubungan dengan China atau dikenal dengan istilah diaspora China.

Selain dari kebijakan thousand talents ini pemerintah China juga mengeluarkan kebijakan baru yang diberlakukan sejak tanggal 1 Februari 2018, yang dimana kebijakan tersebut ditujukan khusus untuk seluruh diaspora China. Kebijakan ini menjadi solusi dari kebijakan pemerintah China sebelumnya dimana memiliki syarat-syarat khusus yang belum tentu mampu dipenuhi oleh semua diaspora China. Kebijakan ini memiliki syarat-syarat yang lebih sederhana dan memungkinkan untuk China diaspora bisa kembali ke China untuk urusan-urusan mereka, sedangkan pemerintah China sendiri mengharapkan kebijakan ini dapat menjadi langkah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih lanjut kebijakan-kebijakan tersebut akan kita bahas dibawah ini.

#### **1. Menarik tenaga ahli berbakat untuk datang ke China**

Pada tahun 2008 pemerintah China mengeluarkan kebijakan Thousand High Talent Programne atau dikenal juga dengan sebutan program seribu bakat. Program ini menjadi

sarana pemerintah China dalam menarik atau merekrut tenaga-tenaga ahli diseluruh dunia untuk datang ke China. Dalam upaya mendatangkan orang-orang yang memiliki bakat ini pemerintah China melakukannya pada skema yang berbeda-beda, dimulai dari provinsi, kota hingga nasional.

Pertama skema ditingkat nasional, pemerintah China mengeluarkan kebijakan Thousand Talent programe guna menarik tenaga berbakat dari seluruh dunia, tercatat hingga tahun 2012, program ini berhasil mendatangkan kembali pelajar terdidik dan terampil asal China dari luar negeri dengan jumlah 3319 orang dan meningkat menjadi lebih dari 4000 pada tahun 2013 (Wang, 2015). Program ini berhasil membantu dan membawa orang-orang yang berbakat kembali ke China. Namun jumlah ini sejatinya lebih kecil dibandingkan jumlah seluruhnya dari tenaga ahli asal China yang telah menetap di negara asing. Hal ini mungkin dikarenakan adanya syarat yang diberikan oleh pemerintah China seperti pelamar harus memiliki gelar doktor dari universitas asing yang memiliki akreditasi terpercaya, atau memiliki jabatan kerja di universitas ternama sebagai profesor. Seseorang yang tidak berasal dari latar belakang akademik juga diperbolehkan menggunakan kebijakan ini tetapi mereka harus memiliki keahlian khusus dibidang tertentu, seperti teknologi dll. Kesimpulannya, skema ditingkat nasional ini membantu dan memacu kembalinya orang-orang berbakat asal China.

Kedua yaitu skema ditingkat regional provinsi, sama seperti pemerintah ditingkat nasional, pemerintah tingkat provinsi juga membuat upaya untuk mendorong orang-orang berbakat asal China untuk kembali ke China. Sebagai contoh adalah provinsi Fujian mengeluarkan kebijakan perizinan tinggal bagi mereka yang memiliki bakat atau tenaga ahli. Mereka yang memegang perizinan ini mendapatkan hak istimewa dalam mencari tempat tinggal, mendaftarkan bisnisnya, memperoleh jaminan sosial dan mendapatkan jaminan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Pada tahun

2011 provinsi Zhejiang memprakarsai program Seagull yang menargetkan akademisi terkemuka dibidang IT dan farmasi. Lima tahun sebelum program Seagull, provinsi Jiangsu juga pernah mendirikan program serupa yang berfokus pada mereka yang memiliki keahlian di bidang bisnis atau pengusaha. Pengusaha yang dimaksud adalah mereka yang memiliki cabang usaha diberbagai negara maju, bagi mereka yang nantinya kembali ke China maka akan mendapat hak istimewa seperti memperoleh rumah tempat tinggal yang baik, pendidikan serta layanan sosial lainnya.

Ketiga yaitu skema dilingkup kota, Shanghai adalah kota pertama yang memulai program tentang mengeluarkan kebijakan guna menarik orang-orang berbakat asal China untuk kembali ke China. Tepatnya pada tahun 1992 kota Shanghai berhasil mendatangkan 20.000 orang untuk hadir ke China dan mendirikan 4000 usaha bisnis baru. Disisi lain Beijing juga berhasil menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat besar dan terkenal di China yaitu China Sillicon Valley (International Labour Organization, 2017).

Sepeerti yang tertera sebelumnya kebijakan pemerintah China dalam skala nasional hingga ke regional menandakan bahwa pemerintah China serius dalam upaya mendatangkan tenaga-tenaga ahli dari luar China. Tenaga yang dimaksud sejatinya difokuskan dan ditujukan kepada mereka yang merupakan warga negara China yang dikenal dengan diaspora China, meskipun pada kenyataannya tetap berlaku bagi semua orang selagi bisa memenuhi syarat yang ditetapkan. Menurut Direktur State Administration of Foreign Experts Affairs, Zhang Jianguo(2016), tercatat pada Januari 2016 ada 313 penerbangan asing yang tertarik dan memanfaatkan skema Thousand Talents.

Banyak sekali kebijakan yang diberikan oleh pemerintah China guna menarik orang asing untuk datang dan ikut membantu pertumbuhan ekonomi China, yang terbaru adalah

program *foreign high-end talent*, program ini serupa dengan program-program sebelumnya seperti Ten Talents dan Thousand talents programe. program foreign high-end talents ini akan memberikan visa yang berlaku 5 hingga 10 tahun kepada pengguna program tersebut, mereka juga akan mendapatkan izin tinggal selama 180 hari secara berturut tanpa harus mengurus izin lagi, selain itu jika memiliki keluarga, maka pasangan dan anaknya juga akan mendapatkan visa yang sama. Departemen luar negeri dan keamanan publik telah mengeluarkan kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan ini sejak tanggal 29 November 2017.

Kebijakan ini bertujuan untuk menarik lebih banyak partisipasi warga asing yang berbakat untuk ikut dalam membangun ekonomi China. Mereka yang memenuhi kriteria syarat yang ditentukan, menurut pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah China, yang dimaksud Talenta Top Asing adalah mereka yang pernah meraih hadiah Nobel, editor senior yang pernah atau sedang bekerj di media milik pemerintah China di luar negeri, pelatih atau pemain asing dari klub-klub olahraga di China dan mahasiswa tingkat doktor dari universitas kelas dunia, dan bagi mereka yang memiliki pendapatan enam kali lipat dari pendapatan rata-rata warga China (Shanghai Administration of Foreign Experts Affairs, 2019).

## **2. Kebijakan Visa khusus diaspora China untuk pertumbuhan ekonomi China**

Melihat bagaimana program-program yang diterapkan oleh pemerintah China dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya melalui warga asing, dapat kita lihat bagaimana syarat-syarat yang ditetapkan cukup sulit jika harus dipenuhi oleh semua orang, hanya mereka yang mampu memenuhi persyaratan yang dapat menggunakan kebijakan tersebut.

Tepatnya pada tanggal 1 Februari 2018, pemerintah China resmi menerapkan kebijakan visa khusus yang ditujukan

kepada orang asing yang merupakan keturunan Tionghoa/etnis China. Dikutip dari South China Morning Post, visa khusus China ini berlaku selama lima tahun, hal inilah yang menjadi pembeda antara visa khusus etnis China ini dengan visa lainnya. Dimana biasanya orang hanya akan mendapatkan visa satu tahun dan hanya untuk beberpa kali kunjungan saja, tetapi pada visa khusus etnis China ini mereka bisa berkunjung beberapa kali dalam kurun waktu selama tiga sampai lima tahun. Mereka yang bisa mendapatkan visa khusus ini adalah mereka yang merupakan warga negara keturunan China yang telah menetap dan mendapatkan hak kewarganegaraan baru dinegara yang ditematinya, selain itu jika seseorang tersebut merupakan keturunan China maka ia juga bisa menggunakan visa ini. Untuk seseorang yang merupakan keturunan etnis China atau diaspora China hanya harus membuktikan bahwa mereka benar merupakan keturunan China.

Yang menarik dari ketentuan syarat untuk keturunan China ini adalah tidak dibatasi berapa jenjang keturunannya dalam siklus kewarganegaraan China. Pemohon hanya perlu membuktikan bahwasannya salah satu orang tua, kakek, nenek ataupun leluhurnya merupakan warga negara China. Selanjutnya pemohon harus menyerahkan dokumen-dokumen beserta salinan paspor atau identitas kerabat sebagai pembuktian kepada pemerintah.

Kebijakan baru visa khusus China ini dikeluarkan untuk mereka orang-orang keturunan China diluar negeri agar dapat dengan mudah mengunjungi kerabat, melakukan pertukaran bisnis, budaya serta menyelesaikan kepentingan-kepentingan pribadinya di China. Mereka yang membutuhkan kunjungan lebih lama untuk pekerjaan dan keperluan pendidikan dapat memanfaatkan kebijakan ini dan mengajukan permohonan kunjungan untuk lima tahun. Untuk pemerintah China sendiri, dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah cara untuk mendorong lebih banyak diaspora China untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi China. Hal ini disampaikan langsung oleh Qu Yunhai selaku kepala biro kementrian

administrasi. Awal diterapkan kebijakan ini dilakukan di zona perdagangan bebas dan zona reformasi ekonomi di sejumlah provinsi dan kota, termasuk Shanghai dan Guangdong. Tercatat hingga Maret 2018 mendapati data resmi dari kementerian bahwa sebanyak 589 juta orang melakukan perjalanan masuk dan keluar melintasi perbatasan China. Dimana jumlah ini meningkat sebanyak 4,76 persen dari tahun sebelumnya. Dari keseluruhan perjalanan itu sekitar setengahnya atau sebanyak 292 juta orang memang melakukan kunjungan ke negara China, jumlah ini meningkat sebanyak 6,73 persen dari tahun 2017. (Zuo, 2018).

Alasan pemerintah China mengeluarkan kebijakan visa khusus untuk diaspora China adalah langkah untuk memberikan peluang kepada diaspora China untuk datang ke China dan diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi China. Jika kita lihat pada pembahasan bab-bab sebelumnya dapat kita ketahui bahwa Diaspora China yang saat ini memiliki jumlah diaspora terbesar di dunia memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi China. Bahkan jumlah mayoritasnya didalam suatu negara juga mempengaruhi jumlah investasi negara tersebut dengan negara China. Selain itu adanya status sebagai negara maju yang sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat bahkan sedang menuju status super power melalui program-programnya seperti yang telah kita bahas pada bab dua, maka jika diaspora China datang dan melakukan kerjasama dengan pihak bisnis di China akan memberikan keuntungan tersendiri. Terkait kebijakan visa khusus ini, terdapat beberapa tanggapan dari berbagai kalangan diantaranya sebagai berikut:

1. Dr Yew Chiew Ping selaku kepala program studi China kontemporer Universitas Ilmu Sosial Singapura mengatakan bahwa perubahan atau pemberlakuan kebijakan visa khusus ini adalah strategi soft power pemerintah China untuk menjangkau lebih banyak diaspora China diluar negeri. Ia juga mengatkan bahwa dalam hal ini, pemerintah percaya bahwa orang

China perantauan akan mengembangkan pandangan yang lebih positif atau menguntungkan tentang China setelah mereka mengunjungi atau tinggal di China, dan melihat sendiri transformasi sosial, ekonomi yang sangat pesat dan luar biasa.

2. Sun Xueling, kepala eksekutif organisasi nirlaba Business China, menanggapi kebijakan visa khusus ini sebagai tujuan China untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga meningkatkan persaingan global, selanjutnya dia juga menambahkan bahwa jika program kebijakan visa khusus ini dimanfaatkan dengan baik maka akan meningkatkan kegiatan sektor bisnis dari berbagai negara khususnya Singapura yang memiliki jumlah diaspora China cukup besar.
3. Charlie li, merupakan seseorang yang pindah untuk menetap di Singapura sejak berusia tiga tahun menanggapi kebijakan “visa khusus ini sebagai suatu hal yang sangat bermanfaat, meskipun menjadi warga negara Singapura tapi ia mengatakan bahwa memiliki kerabat yaitu kakek dan nenek di Shanghai China, dan ini akan menjadi suatu langkah yang memudahkan saya untuk berkunjung ke China.” (Cheong D. , 2018)

Kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada seluruh diaspora etnis China ini akan sangat membantu mereka, seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dimana kondisi ekonomi China saat ini dari segi pendidikan, politik dan ekonomi sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap global. Maka jika bisa ikut ambil peran dalam kegiatan-kegiatan tersebut akan memberikan keuntungan tersendiri. Menurut kantor urusan luar negeri China di provinsi Guangdong, sekitar 800 anak-anak dari keluarga China perantauan kembali ke China untuk mengikuti kegiatan pendidikan terhitung sejak tahun 2016 hingga 2018. Salah satu universitas di Guangdong China, yaitu Universitas Huaqiao memiliki jumlah mahasiswa yang berasal dari China

perantauan sebanyak 1.178 orang, salah satu tenaga akademisi asal China yang sempat mengajar diluar negeri mengatakan bahwa wacana China dalam membangun program one belt one road menjadi sesuatu hal yang penting dalam meningkatkan citra diri China dimata dunia, sehingga menyebabkan orang percaya bahwa China akan memberikan banyak peluang.

Bentuk dari adanya perubahan atau deregulasi terhadap sistem visa yang dapat mempermudah dan memberi kelebihan terhadap penggunanya (diaspora China) ini adalah suatu langkah yang diterapkan oleh pemerintah China guna meningkatkan investasi asing. Pada prakteknya ada banyak bentuk deregulasi yang dilakukan pemerintah dari negara-negara didunia guna mempermudah jalur administrasi serta mempercepat sesuatu yang seharusnya membutuhkan tahapan-tahapan menjadi lebih singkat dan menarik. Seperti adanya kebijakan bebas pajak atau kebijakan lainnya disektor pasar guna mendapatkan masukan investasi baru yang akhirnya akan menopang dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Amadeo, 2018).

Untuk kebijakan serupa dengan apa yang telah dilakukan pemerintah China dalam mengeluarkan kebijakan visa khusus, India sudah pernah mengeluarkan sistem yang hampir mirip, dimana kebijakan tersebut berupa kartu identitas yang ditujukan kepada seluruh diaspora India yang memenuhi syarat. Salah satu tujuan india juga sebagai upaya menarik lebih banyak kunjungan diaspora India untuk dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi India, dan langkah-langkah tersebut berhasil.

#### **D. Negara yang pernah menerapkan kebijakan serupa**

India merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, berada di posisi kedua setelah China. Bersamaan dengan datangnya arus globalisasi mendorong perkembangan zaman sehingga memicu warga India banyak

melakukan migrasi. Sama seperti China, mobilitas dalam globalisasi membawa pandangan bahwa tidak ada batasan-batasan dalam negara Internasional. Berpindah-pindah dengan faktor ekonomi dimana bangsa India lebih banyak bermain pada sektor perdagangan.

Keberlangsungan seperti ini menyebabkan banyak warga keturunan India yang akhirnya menetap dan tinggal di negara-negara lain. Sekitar 30 juta orang India tersebar diseluruh dunia. selama dua dasawarsa terakhir, diantara diaspora India yang sangat besar ini merupakan orang-orang yang sangat terampil seperti dokter, ilmuwan, insinyur, ahli profesional keuangan dan para pegiat sukses wirausaha (Sanchari, 2017). Dengan perkembangan globalisasi yang semakin pesat, keterlibatan diaspora telah berhasil menjadi elemen penting dari kebijakan luar negeri yang kemudian dapat diambil manfaatnya untuk tujuan ekonomi, politik dan sektor strategis lainnya. Banyak cara yang dilakukan pemerintah India guna menjaga hubungan diasporanya.

Ketika seseorang lahir disuatu negara, negara tersebut berhak memutuskan siapa yang menjadi warganya dan siapa yang tidak. Hal ini terjadi ketika negara tersebut menggunakan prinsip peraturan yang demikian. Yang menjadi keutamaan ialah keputusan diambil berdasarkan tempat kelahiran orang tersebut. Di India proses penentuan kewarganegaraan seperti ini diatur dan dijelaskan didalam undang-undang 1955. Pemerintah india menerapkan peraturan kewarganegaraan tunggal. Pada pasal 9 ayat 1 konstitusi India secara jelas menyatakan bahwa setiap warga India yang dengan naturalisasi atau memperoleh hak kewarganegaraan asing maka dia harus berhenti menjadi warga negara India. Pada masa sebelum kemerdekaan, semua negara-negara persemakmuran memiliki satu keanggotaan dan setiap warga negaranya memiliki status kenegaraan yang sama. Tetapi saat beberapa negara mulai memerdekakan diri, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan kewarganegaraan terpisah diantara mereka.

Kewarganegaraan tunggal menggambarkan kesetiaan dan kepercayaan kepada negara. menikmati semua hak didalam suatu negara tersebut serta menyesuaikan dengan hukum yang berlaku, hak-hak ini kemudian tidak bisa diganti oleh warga negara dari negara lain pula. Sedangkan pada sistem kewarganegaraan ganda dapat memungkinkan seseorang bekerja di dua negara berdasarkan prospek yang dianggapnya lebih baik. Begitu juga dengan hak-hak warga negara, mereka yang memiliki dua kewarganegaraan dapat menikmati keduanya.

Di India tidak ada ketentuan yang mengizinkan warganya memiliki kewarganegaraan ganda. Jika ada warga negara India yang memiliki kewarganegaraan dari negara lain maka ia tidak lagi menjadi warga negara India. Tetapi pemerintah India memiliki kebijakan untuk hal ini, jika orang-orang asal India tetapi menetap di beberapa negara asing selain Pakistan dan Bangladesh maka mereka dapat mengajukan permohonan mengurus kartu *Overseas Citizens Indians* (OCI) selagi negara tempat mereka tinggal mengizinkan kepemilikan kewarganegaraan ganda (Law Times Journal, 2017).

Ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah India mengenai diaspora India, antara lain Pravasi Bharatiya Divas (PBD), Persons of Indian Origin (PIO), kartu Overseas Citizens Indians (OCI), program beasiswa anak-anak diaspora (SPDC), serta program mengenal India (KIP). Dari program-program tersebut kita akan membahas dua diantaranya yaitu PIO dan OCI karena program inilah yang sangat dekat dengan para Diaspora India di berbagai negara. Tujuan dari diberlakukannya kebijakan ini adalah untuk mewujudkan kembali ikatan emosional warga India terhadap tanah kelahiran mereka. Tidak hanya itu, dampaknya terhadap peningkatan ekonomi juga sangat besar.

Pemerintah India berharap mereka yang memiliki kartu PIO atau OCI mampu memberikan sumbangsih dalam menopang perekonomian India. Perdana menteri Narendra

Modi mengatakan bahwa pemerintah berterima kasih kepada diaspora India atas kontribusinya yang berhasil meningkatkan perekonomian India. Hal ini diakarenakan adanya kegiatan pengiriman uang yang dilakukan para diaspora India diluar Negeri yang menurut laporan bank dunia mencapai \$ 69 miliar. Situasi seperti ini menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi India dan masyarakat diaspora India. Keterlibatan Diaspora dalam aktivitas pengiriman uang, investasi, menjadi perantara dalam melakukan diplomasi masalah-masalah penting, mempromosikan budaya dan lain-lain secara umum telah berhasil menciptakan citra positif bagi India itu sendiri (Gatade, 2019).

Umumnya orang-orang yang melakukan kunjungan atau tinggal diluar negeri India dikategorikan kedalam tiga kategori utama, yaitu Non-Resident Indians (NRI) yang merupakan istilah untuk orang India yang pindah dan menetap dinegara lain. Tetapi untuk mereka yang ingin tinggal dinegara lain dan masih ingin memiliki hubungan dengan India, pemerintah India memberikan dua kartu khusus yang disebut dengan Persons of Indian Origin (PIO) dan Overseas Citizen of India (OCI). Kartu PIO umumnya diberikan kepada mereka yang berasal dari India dan telah menetap diluar negeri selama satu generasi atau lebih.

Kartu PIO ini akan memberikan izin masuk ke India untuk beberapa tahun dan mengurusnya lagi jika telah mencapai batas waktunya, selama masa berlakunya pemilik kartu ini tidak perlu mengurus visa pelajar atau tenaga kerja jika nantinya berkesempatan bekerja atau menempuh pendidikan di India. Selama tinggal di India, pemilik kartu ini dibebaskan dari pendaftaran regional warga asing. Sedangkan OCI merupakan seseorang yang dulunya merupakan warga negara India yang setidaknya memiliki satu orang tua, kakek, nenek yang merupakan warga India, terdapat beberapa persyaratan untuk memenuhi kriteria ini, tetapi banyak keuntungan yang akan didapat jika terdaftar sebagai Overseas Citizens Indians (Singh, 2017).

Kebijakan kartu PIO dan OCI ini merupakan bentuk deregulasi yang dilakukan pemerintah karena mereka tidak lagi repot mengurus visa jika ingin berkunjung ke India, selain itu mereka yang menggunakan kartu ini tidak perlu repot melaporkan diri sebagai warga negara asing jika tinggal di India dalam kurun waktu tertentu. Tetapi kebijakan ini tidak berlaku disemua negara, pemerintah India mengesampingkan Asia tenggara kecuali Siangpura hal ini dikarenakan pada saat memberlakukan kebijakan ini pemerintah India hanya menysasar negara-negara maju. Kategorisasi ini menyimpan maksud tersendiri dimana pemerintah India ingin memaksimalkan peran diaspora India dari prospek ekonomi (Azizi, 2017).

Intinya setiap warga negara keturunan India diluar negeri akan memiliki pilihan untuk mengajukan kartu Person of Indian Origin (PIO) atau kartu Overseas Citizens of India (OCI). Kartu atau kebijakan inilah yang nanti akan menjadi dokumen sah perjalanan dan identitas jangka panjang sebagai pengganti visa. Tetapi tepatnya pada tanggal 31 Maret 2019 mendatang, semua kartu jenis PIO akan dianggap tidak valid, oleh karenanya dianjurkan segera untuk mengurus kartu OCI untuk menjadi dokumen perjalanan dan identitas yang sah (Little India Desk, 2018).